

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Y., & Adang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Negara Hukum*. Jakarta: Konpres.
- Atmasasmita, R. (2010). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Chazawi, A. (2011). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dirdjosisworo, S. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Faal, M. (1991). *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kuffal, H. M. A. (2007). *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Memalsu*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, L. (2009). *Kejahatan Terhadap Surat: Masalah Prejudisial Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang PressIndo.

Sadli, S. (1977). *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.

Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Susanto, A. (2020). *Hukum Kepolisian Dan Peranannya Dalam Sistem Keamanan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.

- Anggreni, dkk. (2017). "Tinjauan Geografi Penduduk Tentang Sebaran Sapsial dan Karakteristik Migran Asal Pulau Jawa di Kota Singaraja". *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha, Volume 5, Nomor 1 (hlm 5)*.
- Ariestu, I. P. D., Yudiawan, I. D. G. H., Ardhya, S. N., Yasmiati, N. L. W., Kusuma, P. R. A., Cardoso, P. L. W., & Sianturi, J. M. S. (2025). *International legal responsibility for drone operations violating the principle of distinction in civilian areas. In SHS Web of Conferences (Vol. 221, p. 03015). EDP Sciences*.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 91-101*.
- Arta, K.S, dkk. (2021). Penataan Kota Singaraja Zaman Kolonial Belanda (Perspektif Sejarah Kota). *Jurnal IKA, Volume 19, Nomor 1 (hlm. 75-76)*.
- Budiarto, T., & Sumardiyono. (2021). Model Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 51(2), 481-495*.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. (2021). Kekuatan hukum akta jual beli yang dibuat oleh camat dalam kedudukannya sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara (PPATS) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 9(3), 905-916*.
- Darmalaksana, W., & Saputro, Y. (2022). Tinjauan Yuridis Pemalsuan Akta Di Bawah Tangan Dan Potensi Kerugian. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 4(2), 175–190*.

- Gombo, P. D. (2021). *Minol (Alcoholic Beverage) Bill In The Time Of The Covid19 Pandemic In Perspective Law And Ham. Ganesha Law Review, 3(1), 6878.*
- Gunawan, Hendra. 2020. Implementasi Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja. *Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.*
- Hartono, M. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(1), 281-302.*
- Hidayat, A. F., Dkk. (2023). Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Digital Dan Urgensi Pembaharuan KUHP. *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer, 4(1), 22-35.*
- Indrawati, R., Dkk. (2022). Implementasi Fungsi Preventif Dan Represif Kepolisian Dalam Menjaga Ketertiban Umum. *Jurnal Ilmu Kepolisian Indonesia, 4(1), 120-135.*
- Juwanda, 2017. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry*
- Lubis, A. M., & Putri, N. A. (2021). Analisis Unsur Surat Yang Memiliki Daya Bukti Dalam Tindak Pidana Pemalsuan: Studi Komparatif KUHP Dan ITE. *Jurnal Hukum Indonesia, 8(1), 45-60.*
- Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2022). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan

- Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(1), 35-46.
- Nasution, R. I. 2018. Peran Kepolisian Dalam Meminimalisir Balap Liar Di Kota Medan (Studi Di Satlantas Polrestabes Medan) (*Doctoral dissertation*).
- Negara, I. P. A. P., Lasmawan, I. W., & Hartono, M. S. (2023). *Buleleng Resort Police Efforts In Countermeasures Against Illegal Racing In Singaraja City. International Journal Of Law, Tourism, And Culture*, 1(2), 80-86.
- Nissa, Kairun & Christiawan, Putu Indra. (2018). “Etika Lingkungan Masyarakat Pesisir di Kota Singaraja”. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, Volume 6, Nomor 3 (hlm. 4).
- Nurhasan, M., & Kurniawan, D. (2022). Sinergitas Fungsi Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana. *Media Hukum*, 29(1), 101115.
- Parwati, N. P. E. (2024). Tantangan Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Locus Delicti*, 5(2), 98-114.
- Prasetyo, B. (2023). Peran Pelayanan Kepolisian Sebagai Wujud Pengayoman Kepada Masyarakat. *Jurnal Pelayanan Publik*, 7(2), 65–80.
- Purnomo, L. (2020). Urgensi Kebijakan Non-Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Era Digital. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 14(1), 1-18.
- Puspitasari, A. Dkk (2022). Tinjauan Yuridis Kedudukan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Jurnal Hukum Agraria Dan Pertanahan*, 3(1), 1–15.

Ramadhan, I. Dkk (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Integritas Dokumen Publik Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 101–115.

Santoso, E. Dkk. (2020). Analisis Unsur Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 KUHP) Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Publik. *Jurnal Supremasi Hukum*, 15(2), 180–195.

Wardani, S., & Kusuma, B. (2020). Kedudukan Alat Bukti Elektronik Sebagai Surat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 27(3), 591–608.

Yudiawan, I. D. G. H., Hartono, M. S., & Yasmianti, N. L. W. (2023). Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Jasa Penyiaran Berbasis Internet. *Ganesha Law Review*, 5(1), 78-93.

Yulianti, N. P. R. (2021). Legal protection of women and children from violence in the perspective of regional regulation of Buleleng regency number 5 year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.

SKRIPSI

Gombo, P. D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berkarakter Transgender Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).

Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Buleleng) (Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).

Putra, I. B. K. B. (2024). Peran Kepolisian Dalam Menangani Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dan Mental Terhadap Anak (Studi Kasus Di Wilayah

Hukum Polres Buleleng) (*Doctoral Dissertation*, Universitas Pendidikan Ganesha).

Suputra, M. K. K. H. (2023). Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana

Teriyasa, I Made (2023) Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Balapan

Liar Di Kota Singaraja. *Undergraduate Thesis*, Universitas Pendidikan Ganesha.

ARTIKEL ELEKTRONIK

detikBali. 2024. “Dua Pemalsu STNK Ditangkap Polres

Buleleng, Beroperasi Delapan Bulan”. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d7285093/dua-pemalsu-stnk-ditangkap-polres-buleleng-beroperasi-delapanbulan> di akses pada 28 November 2025.

Suara Dewata. 2021. “Berkas Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Bolak Balik,

Warga Bungkulun Datangi Kejari Buleleng”. 25 Mei 2021.

.<https://www.suaradewata.com/berita/202105260002/berkas-kasus-dugaan-pemalsuan-dokumen-bolak-balik-warga-bungkulan-datangi-kejari-buleleng> di akses pada 23 Juni 2026.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

